



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
SUB UNIT KERJA : BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARIFIN
2. Jabatan : KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
3. NHK : 102719

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.390.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m²/200 m² di KOTA MATARAM ,
HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 191 m²/100 m² di KOTA MATARAM ,
HASIL SENDIRI Rp. 440.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 309.400.000

1. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL
SENDIRI Rp. 8.500.000
2. MOBIL, KIJANG KIJANG INNOVA 2.0 GMT Tahun 2016, HASIL
SENDIRI Rp. 275.000.000
3. MOTOR, HONDA/XIH02N35MI SPM R2 Tahun 2019, HASIL
SENDIRI Rp. 25.900.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 69.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 60.100.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 1.828.500.000**III. HUTANG** Rp. ---**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.828.500.000

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **23 Januari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.